

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI

**Merindu Indonesia Baru
Tanpa Kekerasan**

**Pencetakan Bahan UN
dan Masalahnya**



Berita BSNP:

**Kunjungan Mahasiswa
Michigan State University ke BSNP**

Penanggungjawab
Moehammad Aman Wirakartakusumah

Pemimpin Redaksi
Edy Tri Baskoro

Redaksi Eksekutif
Richardus Eko Indrajit
Djemari Mardapi
Teuku Ramli Zakaria
Weinata Sairin

Redaksi Pelaksana
Bambang Suryadi

Penyunting/Editor
Mungin Eddy Wibowo
Zaki Baridwan
Djaali
Furqon
Gunawan Indrayanto
F. A. Moeloek
Jamaris Jamna

Desain Grafis & Fotografer
Arief Rifai Dwiyanto
Djuandi

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih

Alamat:
**BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN**

Gedung D Lantai 2,
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591

Email: info@bsnp-indonesia.org
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah, Buletin BSNP edisi kedua tahun 2013 dapat hadir di tangan pembaca tepat waktu. Edisi kali ini mengangkat isu tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pencetakan Bahan Ujian Nasional dan Permasalahannya. Artikel tentang Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI dan kunjungan mahasiswa dari Michigan State University juga kami sajikan untuk melengkapi penerbitan edisi kedua ini. Tidak ketinggalan pula adalah kegiatan BSNP yang disajikan dalam bentuk lensa/foto.

Penerbitan ini merupakan penerbitan terakhir untuk anggota BSNP periode 2009-2013 yang akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2013. Semoga penerbitan buletin BSNP dapat diteruskan oleh pengelola baru nanti. Atas nama redaksi dan segenap tim penerbitan, kami meminta maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan selama ini.

Selamat membaca.

Daftar Isi

3- 5

**Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI
(Bagian VIII)**

6- 8

Merindu Indonesia Baru Tanpa Kekerasan

9- 11

Pencetakan Bahan UN dan Masalahnya

12- 16

Berita BSNP:

- Kunjungan Mahasiswa Michigan State University ke BSNP
- Pengembangan SNPT: Regulasi Vs Otonomi
- Pelaksanaan UNPK Tahap II

17- 19

Lensa BSNP

Keterangan Gambar Cover

Laura Apol, Ph.D (depan, kiri) pimpinan rombongan mahasiswa program doktor dari Michigan State University saat berdialog dengan BSNP tentang Standar Nasional Pendidikan di Jakarta (foto atas). Sebagian anggota BSNP dan tim ahli Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) berpose bersama Ketua BSNP M. Aman Wirakartakusumah (duduk, sebelah kiri) dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Illah Sailah (duduk, sebelah kanan), setelah menyelesaikan draf SNPT di Jakarta (foto bawah).

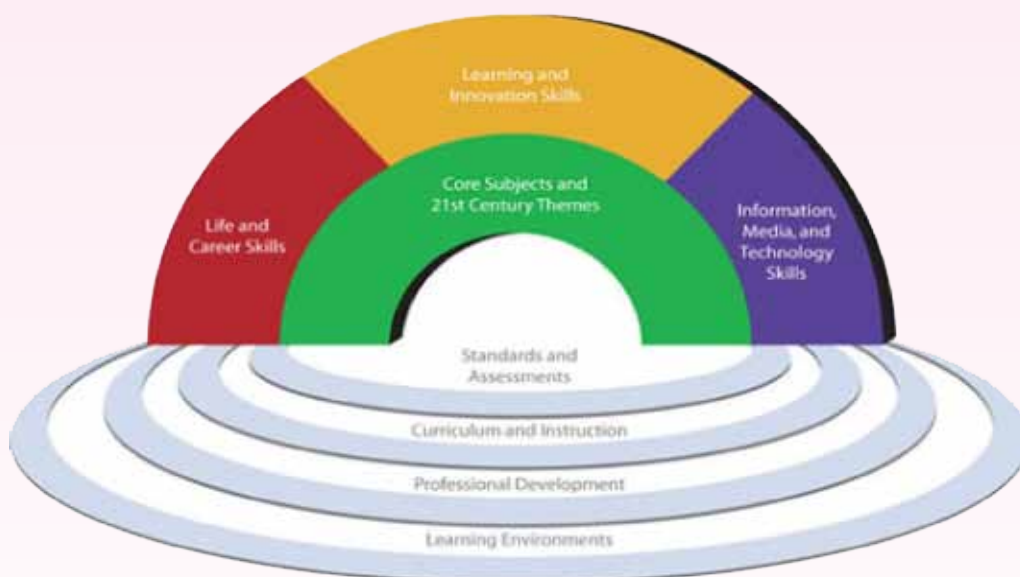
PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI (Bagian VIII)

Tim BSNP

4.5. Kualifikasi SDM Abad XXI

Perubahan radikal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di abad XXI akan membutuhkan perhatian yang cermat dari para pelaku dan pengambil keputusan di pemerintahan. Salah menilai, menyusun, dan mengembangkan kebijakan akan berakibat fatal terhadap laju pertumbuhan sebuah negara. Dari semua komponen dan aspek pertumbuhan yang ada, manusia merupakan faktor yang terpenting karena merupakan pelaku utama dari berbagai proses dan aktivitas kehidupan. Oleh karena itulah berbagai negara di dunia berusaha untuk mendefinisikan karakteristik manusia abad XXI yang dimaksud. Berdasarkan “*21st Century Partnership Learning Framework*”, terdapat beberapa kompetensi dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh SDM abad XXI, yaitu:

- Kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), yaitu mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
- Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
- Kemampuan mencipta dan mem-baharui (*Creativity and Innovation Skills*) – mampu mengembangkan kreativitas yang dimiliki untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif;
- Literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari;
- Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*), mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai



- bagian dari pengembangan pribadi;
- f. Kemampuan informasi dan literasi media (**Information and Media Literacy Skills**), mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak.

Di samping itu didefinisikan pula sejumlah aspek berbasis karakter dan perilaku yang dibutuhkan manusia abad XXI, yaitu:

- a. **Leadership** – sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai terobosan-terobosan;
- b. **Personal Responsibility** – sikap bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu mandiri;
- c. **Ethics** – menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan sosial;
- d. **People Skills** – memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial;
- e. **Adaptability** – mampu beradaptasi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan;
- f. **Self-Direction** – memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam usahanya untuk mencapai cita-cita sebagai seorang individu;
- g. **Accountability** – kondisi di mana seorang individu memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan;
- h. **Social Responsibility** – memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kehidupan maupun komunitas yang ada di sekitarnya; dan
- i. **Personal Productivity** – mampu meningkatkan kualitas kemanusiaannya melalui berbagai aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.

Banks menambahkan bahwa selain keahlian dan karakter tersebut, dibutuhkan pula kemampuan seorang individu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang nyata berada di hadapan mereka pada abad XXI, terutama terkait dengan:

- a. **Global awareness** – kemampuan dalam melihat kecenderungan dan tanda-tanda jaman terutama dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi;
- b. **Financial, economic, business and entrepreneurial literacy** – keahlian dalam mengelola berbagai sumber daya untuk

- meningkatkan kemandirian berusaha;
- c. **Civic literacy** – kemampuan dalam menjalankan peran sebagai warga negara dalam situasi dan konteks yang beragam; dan
- d. **Environmental awareness** – kemauan dan kepedulian untuk menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar.

BAB V: STRATEGI PENCAPAIAN

5.1. Model Pendidikan Masa Mendatang

Sadar akan tingginya tuntutan “penciptaan” SDM, maka sistem serta model pendidikan pun harus mengalami transformasi. Telah banyak literatur yang merupakan buah pemikiran dan hasil penelitian yang membahas mengenai hal ini, bahkan beberapa model pendidikan yang sangat berbeda telah diterapkan oleh sejumlah sekolah maupun kampus di berbagai belahan dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dideskripsikan sejumlah ciri dari model pendidikan di abad XXI yang perlu dicermati dan dipertimbangkan yang untuk sebagian besar dipaparkan berikut ini.

5.1.1. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu penyebab dan pemicu perubahan dalam dunia pendidikan. Dengan ditemukan dan dikembangkannya internet – sebuah jejaring raksasa yang menghubungkan milyaran pusat-pusat data/informasi di seluruh dunia dan individu/komunitas global – telah berubah juga proses pencarian dan pengembangan ilmu di berbagai lembaga pendidikan. Melalui *search engine* seorang ilmuwan dapat dengan mudah mencari bahan referensi yang diinginkannya secara “*real time*” dengan biaya yang teramat sangat murah; sementara dengan memanfaatkan “*electronic mail*” para ilmuwan berbagai negara dapat berkolaborasi secara efektif tanpa harus meninggalkan laboratoriumnya; atau dengan mengakses situs repositori video seorang mahasiswa dapat melihat rekaman kuliah dosen dari berbagai universitas terkemuka di dunia. Semua itu dimungkinkan karena bahan ajar dan proses interaksi telah berhasil “didigitalisasikan” oleh kemajuan teknologi. Salah satu butir kesepakatan Konferensi WSIS (*World Summit of Information Society*) tahun 2004 di Jenewa, telah disepakati bahwa paling lambat tahun 2015, semua sekolah dan kampus di seluruh dunia telah terhubung ke internet. Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses tukar menukar pengetahuan dan kolaborasi antar siswa-siswa dan guru-guru di seluruh dunia untuk meningkatkan kualitas

kehidupan manusia.

5.1.2. Peran Strategis Guru/Dosen dan Peserta Didik

Dengan adanya dan mudahnya akses terhadap berbagai pusat pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka peran guru/dosen dan peserta didik pun menjadi berubah. Kalimat "*the world is my class*" mencerminkan bagaimana seluruh dunia beserta isinya ini menjadi tempat manusia pembelajar meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, dalam arti kata bahwa proses pencarian ilmu tidak hanya berada dalam batasan dinding-dinding kelas semata. Peran guru pun tidak lagi menjadi seorang "*infomediary*" belaka, karena sang peserta didik sudah dapat secara langsung mengakses sumber-sumber pengetahuan yang selama ini harus diseminasi atau didistribusikan oleh guru/dosen di kelas. Guru akan lebih berfungsi sebagai fasilitator, pelatih (*coach*), dan pendamping para siswa yang sedang menjalani proses pembelajaran. Bahkan secara ekstrim, tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam sejumlah konteks, guru dan murid bersama-sama belajar dan menuntut ilmu melalui interaksi yang ada di antara keduanya ketika sedang membahas suatu materi tertentu. Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pun harus diperluas melampaui batas-batas ruang kelas, dengan cara memperbanyak interaksi siswa dengan lingkungan sekitarnya dalam berbagai bentuk metodologi.

5.1.3. Metode Belajar Mengajar Kreatif

Berpegang pada prinsip bahwa setiap individu itu unik dan memiliki talentanya masing-masing, maka metode belajar mengajar pun harus memperhatikan keberagaman "*learning style*" dari masing-masing individu. Oleh karena itulah model belajar yang menekankan pada ciri khas dan keberagaman ini perlu dikembangkan, seperti misalnya yang diperkenalkan dalam: PBL (*Problem Based Learning*), PLP (*Personal Learning Plans*), PBA (*Performance Based Assessment*), dan lain sebagainya. Di samping itu, harus pula ditekankan model pembelajaran berbasis kerjasama antar individu tersebut untuk meningkatkan kompetensi interpersonal dan kehidupan sosialnya, seperti yang diajarkan dalam konsep: *Cooperative Learning*, *Collaborative Learning*, *Meaningful Learning*, dan lain sebagainya. Salah satu tugas utama guru adalah untuk memastikan bahwa melalui mekanisme pembelajaran yang dikembangkan, setiap individu dapat mengembangkan seluruh potensi diri yang dimilikinya untuk menjadi manusia pembelajar yang berhasil.

5.1.4. Materi Ajar yang Kontekstual

Besarnya pengaruh media (seperti televisi, surat kabar, majalah, internet, dan radio) terhadap masyarakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi kognitif peserta didik – dalam arti kata bagi mereka akan lebih mudah menggambarkan kejadian atau hal-hal yang nyata (faktual) dibandingkan dengan membayangkan sesuatu yang bersifat abstrak. Oleh karena itulah maka materi ajar pun harus mengalami sejumlah penyesuaian dari yang berbasis konten menjadi berorientasi pada konteks. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah mengubah pendekatan pola penyelenggaraan pembelajaran dari yang berorientasi pada diseminasi materi dari sebuah mata ajar menjadi pemahaman sebuah fenomena dipandang dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan (multidisiplin atau ragam mata ajar). Contoh-contoh kasus sehari-hari yang ditemui di masyarakat, problem-problem yang bersifat dilematis atau paradoksial, tantangan riset yang belum terpecahkan, simulasi berbagai kejadian di dunia nyata, hanyalah merupakan sejumlah contoh materi ajar yang kontekstual dan dapat dicerna oleh peserta ajar dengan mudah. Paling sedikit manfaat yang dapat segera diperoleh dari model pembelajaran berbasis multi disiplin ilmu ini adalah, bahwa yang bersangkutan dapat mengerti konteks ilmu yang diberikan dalam penerapannya sehari-hari dan di saat yang sama juga memperoleh sejumlah alternatif pemecahan masalah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

5.1.5. Struktur Kurikulum Mandiri berbasis Individu

Karena setiap individu berusaha untuk mengembangkan potensinya berdasarkan bakat dan talenta yang dimilikinya, yang didorong dengan cita-cita atau target pencapaian dirinya di masa mendatang, maka struktur kurikulum yang diterapkan pun harus dapat disesuaikan (*customised, tailor made curriculum*) sesuai dengan kebutuhan dan rencana atau agenda masing-masing individu. Mengembangkan kurikulum mandiri berbasis individu ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu desain dan konsep yang matang serta terbukti efektif dalam implementasinya. Di samping itu diperlukan juga pemenuhan sejumlah prasyarat atau prakondisi terlebih dahulu sebelum menerapkan struktur kurikulum seperti ini, antara lain: kesiapan fasilitas dan sarana prasarana, kematangan peserta ajar, infrastruktur dan suprastruktur manajemen institusi yang handal, konten pengetahuan yang lengkap, dan lain sebagainya. ● (bersambung)

Merindu Indonesia Baru Tanpa Kekerasan

Weinata Sairin*)

Intoleransi

Intoleransi, kekerasan dan pembiaran oleh negara telah menjadi bagian integral dari ke-Indonesia-an kita dalam beberapa waktu terakhir ini. Negara tidak hadir ketika sebagian warga bangsa diusir saat mereka menjalankan ibadah; negara absen ketika penembakan terjadi terus menerus di wilayah Papua dan merenggut banyak jiwa; negara diam ketika rumah ibadah sebuah kelompok agama dirusak hanya karena mereka berbeda pandangan; negara membisu tatkala konflik dan kekerasan merebak dimana-mana. Negara gagal menjadi sebuah negara yang di dalamnya seluruh warga bangsa seharusnya mendapat perlindungan.

Kekerasan, intoleransi, kegagalan negara amat menyakitkan dan mencoreng wajah Indonesia. Menyadari bahwa virus kekerasan telah menjalar hampir semua ruang kehidupan, maka Etik Global yang dideklarasikan di Chicago tahun 1993 menegaskan, pentingnya umat manusia kembali menyadari adanya suatu etik agung dari berbagai tradisi keagamaan yang berbunyi, : “Jangan membunuh, hormatilah kehidupan”.

Dalam konteks itu, semua orang mempunyai hak untuk hidup, selamat dan mengembangkan kepribadian secara bebas, sejauh mereka tidak merugikan hak-hak orang lain; tak ada seorang pun yang berhak secara fisik atau psikis untuk menyiksa, merugikan, atau membunuh orang lain. Tidak ada ruang, negara, ras atau agama, yang berhak untuk membenci, melakukan diskriminasi, menghabiskan atau memberisihkan, mengasingkan, menghapus suatu minoritas tertentu yang memiliki perilaku dan menyatakan kepercayaan yang berbeda.

Konflik-konflik seharusnya diselesaikan tanpa kekerasan, dengan menggunakan kerangka keadilan, antarnegara atau antarindividu. Para penguasa harus berani menentang para pelaku tindak kekerasan. Kekerasan



bukanlah alat untuk menghapus perbedaan dengan orang lain. Hanya budaya tanpa kekerasan yang boleh dikembangkan. Demikian beberapa pernyataan dari Etik Global tahun 1993 yang amat penting dijadikan agenda dari kegiatan organisasi-organisasi di berbagai lingkup. Berdasarkan pengalaman empirik, kekerasan terjadi akibat faktor-faktor politik, sosial ekonomi, tetapi juga faktor psikologis dan faktor moral, agama.

Tatkala nilai-nilai moral dan aspek-aspek agama tidak lagi mampu menjadi kendali dalam kehidupan seseorang, maka pada gilirannya tindak kekerasan dapat dilakukan oleh orang tersebut.

Indonesia Baru

Sesudah kejatuhan Soeharto 21 Mei 1998, maka Indonesia memasuki era reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Ada 6 pokok agenda reformasi yang dicanangkan mahasiswa, yaitu:

- Amandemen UUD 1945,
- Tegakkan supremasi hukum, dan bebaskan Indonesia dari praktik KKN dalam segala bentuknya,
- Reposisi ABRI,
- Adili Soeharto beserta kroni-kroninya,

*) Anggota BSNP dan Teolog

- Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan otonomi daerah seluas-luasnya,
- Pengembangan tata kehidupan yang demokratis dalam segala aspeknya.

Sebagaimana diketahui 6 agenda reformasi ini telah menjadi inti pokok dalam rangka mewujudkan sebuah Indonesia baru yang lebih damai, adil, terbuka, dan bersatu, walaupun harus disadari bahwa belum semua dari enam agenda itu dapat terlaksana.

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Indonesia baru? Indonesia baru atau masyarakat baru Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi bagian dari wacana para elit pimpinan dalam konteks antusiasme gerakan reformasi. Dimasa lalu, dokumen GBHN 1999-2004, masyarakat baru Indonesia dirumuskan sebagai masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam menyelenggarakan negara.

Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdiknas dalam dokumen Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia (2000) merinci masyarakat madani Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. religius dan berbudi luhur;
- b. adil dan sejahtera;
- c. demokratis dan toleran;
- d. mandiri dan bertanggung jawab;
- e. tertib dan teratur;
- f. setara dan berkebersamaan;
- g. berintegrasi dan berketangguhan daya; dan
- h. dinamis dan berorientasi ke masa depan.

Prof. H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa masyarakat Indonesia baru atau masyarakat Indonesia masa depan adalah suatu masyarakat demokratis yang memiliki banyak pilihan dan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia yang dapat dicermati oleh manusia cerdas. Untuk melakukan pilihan yang tepat, tidak hanya dibutuhkan IPTEK tetapi juga pertimbangan moral. Manusia Indonesia masa depan adalah manusia yang beradab, manusia yang bermoral.

Ternyata ada banyak varian dalam perumusan tentang Indonesia baru atau masyarakat Indonesia yang baru, ada yang menyatakan bahwa Indonesia baru adalah sebuah Indonesia yang memiliki tatanan lebih demokratis, harkat

dan martabat manusia dihormati, dan keadilan dan hukum mendapat tempat dan peran yang kukuh. Namun ada juga keinginan untuk membentuk sebuah Indonesia baru yang desainnya diwarnai oleh nilai-nilai suatu agama. Kondisi-kondisi ini harus dicermati dengan baik agar Indonesia baru tidak merupakan sesuatu yang fatal bagi masyarakat dan bangsa kita yang majemuk.

Indonesia baru yang kita ingin capai adalah sebuah Indonesia yang mampu merefleksikan apa yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara 1945, yaitu:

1. terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran bernegara dan cinta Tanah Air Indonesia sehingga turut melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam arti masyarakat memiliki rasa aman, kebebasan, kebersamaan, kesetaraan, sifat kegotongroyongan, dan sifat kekeluargaan.
3. terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas dalam arti menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi namun tetap berbudaya Indonesia sehingga memiliki daya saing di hadapan pada perkembangan dunia.
4. terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan social.

Dengan kata lain, yang kita inginkan adalah sebuah Indonesia baru yang memberi tempat bagi rakyat, menghargai harkat dan martabat manusia, memberi tempat bagi hukum dan keadilan, menghargai keragaman tanpa membedakan ikatan/latar belakang primordial, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran Tokoh Masyarakat

Di tengah-tengah impian hadirnya sebuah Indonesia baru, kita malah kini tengah hidup dalam kepungan global yang tak terelakkan. Dalam realitas SDM yang berpendidikan rendah, ketidakmampuan untuk menolak arus globalisasi, neoliberalisme yang telah merasuki kehidupan, budaya, serta gaya hidup global yang tak bisa lagi dihadang,

kesemuanya telah nyaris meruntuhkan nilai-nilai keindonesiaan yang masih kita warisi, dan membuat kita makin terpuruk. Dalam situasi seperti ini, secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh kita wajib menghidupkan kembali nilai-nilai keindonesiaan agar jatidiri keindonesiaan kita kembali mengemuka dan mampu bertahan di kancah globalisasi dan ancaman terorisme.

Nilai-nilai Keindonesiaan adalah kemandirian, toleransi, tenggang rasa, amanah, pluralitas, gotong-royong, tanggung jawab, mendahulukan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi, dan integritas moral. Daftar ini tentu masih bisa ditambah, misalnya dengan musyawarah dan mufakat, solidaritas sosial, dan ramah-tamah, namun juga harus ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, harus disebut sebagai nilai-nilai keindonesiaan.

Harus diakui dengan jujur bahwa modernisasi yang kemudian diikuti dengan globalisasi telah menggerus nilai-nilai keindonesiaan yang kita miliki, yang bermuara terjadinya berbagai distorsi dalam kehidupan masyarakat kita, termasuk munculnya budaya konsumerisme, hedonisme, dan materialisme. Kebanggaan terhadap jatidiri bangsa melalui penggunaan kekayaan budaya bangsa, makin terkikis oleh nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik. Menghadapi realitas ini perlu dilakukan berbagai upaya yang serius, terarah, dan terencana yang mendorong peningkatan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.

Sejalan dengan itu perlu direaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memeperkuat identitas nasional. Ketahanan budaya nasional juga perlu diperkukuh sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memilah secara kreatif dan kritis budaya asing yang memiliki nilai positif. Dengan berbasis Bhineka Tunggal Ika dan respek terhadap keragaman budaya bangsa, maka kita akan mampu melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai keindonesiaan.

Para tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh pendidikan, dll) memiliki peran yang amat strategis dalam rangka

merevitalisasi nilai-nilai keindonesiaan. Dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat ia memiliki daya pengaruh yang kuat dan signifikan bagi masyarakat yang berada dalam tanggung jawabnya. Sehubungan dengan hal tersebut, peran yang bisa dilakukannya adalah:

- a. menunjukkan komitmen yang kuat dan keteladanan dalam memberi ruang dan mengaktualisasikan nilai-nilai keindonesiaan.
- b. melawan berbagai kecenderungan dan praktik-praktik yang secara nyata meniadakan nilai-nilai keindonesiaan.
- c. memotivasi umat dan masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keindonesiaan dalam kehidupan mereka dengan bersumber pada ajaran agama
- d. melakukan kerja sama lintas institusi/lintas disiplin ilmu dan pelibatan seluruh warga bangsa untuk mengkampanyekan pentingnya ditumbuhkan kembali nilai-nilai keindonesiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
- e. mendorong diterbitkannya perangkat-perangkat hukum yang memberi dasar bagi revitalisasi nilai-nilai keindonesiaan.

Peran tokoh masyarakat, buku-buku, multimedia, dalam upaya membentuk Indonesia baru amat penting dikedepankan dihari-hari mendatang. ●

Pencetakan Bahan UN dan Masalahnya

Oleh Teuku Ramli Zakaria*)

Pendahuluan

Pencetakan bahan ujian merupakan salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Berbagai masalah yang terjadi dan berkaitan dengan pencetakan, antara lain: kebocoran soal, kesalahan dalam pengepakan, kekeliruan dalam pendistribusian, mutu pencetakan naskah soal yang rendah, kertas soal yang tidak sesuai spek, lembar jawaban yang kurang baik, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan UN tahun ini, ketidak-sanggupan sebuah percetakan menyelesaikan pekerjaan pencetakan dan pendistribusian tepat waktu telah menyebabkan pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK di 11 provinsi Indonesia bagian tengah digeser, dari hari Senin tanggal 15 April 2013 menjadi hari Kamis tanggal 18 April 2013.

Mengapa pencetakan menjadi salah satu sumber masalah? Sepanjang pelaksanaan UN ada 4 fase perkembangan pencetakan bahan ujian. Masing-masing fase tersebut sebagai berikut.

Bahan ujian dicetak di daerah oleh percetakan yang ditunjuk.

Pada era ujian akhir yang diselenggarakan oleh sekolah sepenuhnya, yang disebut dengan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA), pencetakan naskah soal ujian sepenuhnya disiapkan oleh masing-masing sekolah penyelenggara. Pada fase Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), bahan ujian dicetak pada tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan ditunjuk secara langsung. Fase ini berlangsung sampai dengan awal pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) pada tahun 2002. UAN ini kemudian disebut Ujian Nasional (UN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada fase ini, masalah yang agak menonjol adalah kebocoran soal. Kebocoran soal memang tidak terjadi di



semua daerah. Perusahaan percetakan memang tidak terlibat secara langsung dalam pembocoran soal. Pada umumnya kebocoran soal terjadi karena adanya kerja sama antara pekerja dalam proses pencetakan dengan pihak-pihak tertentu di luar, yang berkepentingan dengan bocoran soal ujian.

Bahan ujian dicetak di daerah dengan tender terbatas

Fase kedua, bahan ujian dicetak oleh perusahaan percetakan di daerah dan ditenderkan secara terbatas. Perusahaan percetakan yang mengikuti tender adalah yang memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan hasil visitasi dan penilaian Tim Visitasi yang dibentuk oleh penyelenggara pusat. Faktor-faktor yang dinilai dalam visitasi berkaitan dengan: keamanan dan kerahasiaan, kualitas hasil pencetakan, dan jaminan ketepatan waktu penyelesaian pencetakan. Keamanan dan kerahasiaan, dinilai dengan memperhatikan letak dan lingkungan serta kondisi gedung percetakan, termasuk ruangan, ventilasi, jendela, serta pintu masuk dan keluar. Kualitas hasil percetakan, dinilai dengan melihat dari segi peralatan

*) Penulis adalah Anggota BSNP

yang dimiliki, pengalaman, dan hasil kerja yang ada. Ujian harus dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang ditetapkan, dan sayogianya tidak ditunda karena alasan apapun. Oleh karena itu, jaminan kemampuan percetakan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu perlu diperhatikan dan dinilai. Aspek ini dinilai dengan melihat kelengkapan dan kecanggihan peralatan percetakan dan sumber daya manusia yang dimiliki percetakan.

Pada fase ini, mutu hasil percetakan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan serta pendistribusian bahan ujian relatif tidak masalah. Namun kebocoran soal tetap masih menjadi masalah. Mengontrol keamanan dan kerahasiaan bahan ujian dalam proses percetakan di semua daerah merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Upaya untuk mendapat bocoran bahan ujian, ditengarai ada yang berasal dari bimbingan belajar, untuk mendongkrak reputasi bimbingan belajar, dan ada berasal dari instansi terkait di daerah, untuk mendongkrak capaian nilai UN, yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja daerah. Seperti kita ketahui, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan merupakan salah satu bidang yang diotonomikan. Oleh karena itu, daerah sangat berkepentingan untuk mendongkrak capaian nilai UN sebagai indikator kinerja. Namun demikian, sumber kebocoran soal UN yang sebenarnya, sampai saat ini belum pernah terungkap secara tuntas.

Bahan ujian dicetak di daerah dengan tender terbuka

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pengadaan barang yang mencapai nilai > Rp. 200.000,- (lebih besar dari dua ratus juta rupiah) harus dilakukan pelelangan terbuka, maka percetakan bahan UN pun dilakukan dengan lelang terbuka (PP No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa). Tender dilakukan di daerah dan pesertanya tidak terbatas pada perusahaan percetakan yang ada di masing-masing daerah. Tender terbuka di daerah dilakukan pada pelaksanaan UN tahun 2010 dan 2011.

Karena sifatnya terbuka, suatu perusahaan percetakan dalam wilayah hukum NKRI bebas untuk mengikuti tender di daerah manapun. Visitasi dan

penilaian percetakan, yang sebelumnya dilakukan BSNP dan Pusat Penilaian Pendidikan, tidak lagi dilakukan. Karena, visitasi dan penilaian seperti itu dipandang sebagai pembatasan dan bertentangan dengan prinsip tender terbuka.

Pada waktu tender terbuka di daerah banyak menuai masalah, terutama mutu hasil percetakan kurang baik, kebocoran soal, serta kekeliruan dalam pengamplopan dan pendistribusian bahan ujian, karena banyak perusahaan percetakan yang memenangi tender berasal dari luar daerah. Ada satu hal yang lebih parah pada waktu tender terbuka di daerah. Perusahaan percetakan yang sudah teridentifikasi kurang baik kinerjanya dalam percetakan bahan UN tahun yang lalu di suatu daerah, dalam proses tender bahan UN tahun berikutnya dapat berganti nama dan mengikuti tender lagi di daerah yang lain. Hal ini sukar terditeksi, karena proses tender di lakukan di masing-masing daerah.

Bahan ujian dicetak di pusat dengan tender terbuka

Bedasarkan pengalaman dalam proses percetakan bahan ujian di atas, dalam penyelenggaraan UN tahun 2012 proses tender dan percetakan bahan ujian dilakukan secara terpusat, dengan harapan proses percetakan, mutu hasil cetakan, dan pendistribusian menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, masih ada kelemahan pada mutu sebagian hasil cetakan. Kekeliruan dalam pengamplopan dan pendistribusian bahan ujian masih saja terjadi. Bahkan dalam penyelenggaraan UN tahun 2013 ini, karena ketidak siapan sebuah perusahaan percetakan, dampak negatifnya sampai pada pergeseran waktu ujian, yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah pelaksanaan UN.

Penutup

Pencetakan bahan ujian sebaiknya tidak ditenderkan tetapi ditunjuk perusahaan-perusahaan percetakan yang betul-betul memenuhi persyaratan kelayakan, berdasarkan pada hasil penilaian yang cermat dan objektif. Selain dari itu, hal yang sangat penting pula mendapat perhatian adalah harus terjamin aman dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahan ujian sebaiknya termasuk dalam kategori pengadaan

barang yang dikecualikan dari ketentuan tender.

Pengalaman menunjukkan, pentenderan cetakan bahan ujian merupakan salah satu sumber masalah dalam pelaksanaan Ujian Nasional saat ini. Menurut pengalaman penulis dalam kunjungan ke beberapa negara lain, pencetakan bahan ujian tidak ada yang ditenderkan seperti di Indonesia. Misalnya, yang paling dekat, di Malaysia dan Singapura yang menyelenggarakan ujian nasional, bahan ujiannya tidak ditenderkan. University of Cambridge Examination Syndicate (UCLES), salah satu pusat pengujian di Inggris, dan American

College Testing (ACT), salah satu pusat pengujian di Iowa, Amerika Serikat, pencetakan bahan ujian pada 2 lembaga ini juga tidak ditenderkan, melainkan dicetak sendiri pada percetakan yang mereka miliki. Selama pencetakan bahan UN masih ditenderkan seperti sekarang, kekisruhan dalam pencetakan dan pendistribusian bahan ujian rasanya akan kembali terulang dan sukar dihindari. Masalah pencetakan bahan ujian ini perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan UN yang baik, untuk memperoleh hasil UN yang *credible*. ●

Segenap Anggota dan Staf
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
Mengucapkan

**SELAMAT MENEMPUH UJIAN NASIONAL
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**PROGRAM PAKET C (1-4 Juli 2013)
PROGRAM PAKET C KEJURUAN (1-4 Juli 2013)
PROGRAM PAKET B (1-3 Juli 2013)
PROGRAM PAKET A (1-3 Juli 2013)**

**PERCAYA DIRI DAN KEJUJURAN
ADALAH KUNCI KESUKSESAN**

Ketua BSNP

Ttd

Prof. Dr. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc

KERAGAMAN BUDAYA: KEKAYAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Kunjungan Mahasiswa Michigan State University ke BSNP



Sistem pendidikan nasional menjadi kajian yang menarik tidak hanya bagi mahasiswa di dalam negeri, tetapi juga mahasiswa dari luar negeri. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan lima belas orang dari Michigan State University ke BSNP untuk melakukan dialog dan diskusi tentang standar nasional pendidikan pada hari Selasa (21/5/2013). Para mahasiswa program doktor tersebut mewakili berbagai jurusan dan berasal dari berbagai negara, termasuk dua orang dari Indonesia, di bawah koordinasi dosen pembimbing Laura Apol. Diantara isu yang mereka bincangkan adalah kebijakan sentralisasi dan desentralisasi, pengembangan kurikulum, keragaman budaya, dan ujian nasional.

Menurut Dwi Yuliantoro, salah satu mahasiswa dari Indonesia, selain mengunjungi BSNP, rombongan juga berkunjung ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan beberapa sekolah di Jakarta. "Tujuan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia", ungkapnya.

M. Aman Wirakartakusuma Ketua BSNP

dalam sambutannya mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah desentralisasi untuk pendidikan dasar dan menengah, sedangkan untuk pendidikan tinggi, masih sentralisasi. Artinya pengelolaan pendidikan dasar dan menengah diserahkan kepada pemerintah daerah. Sistem ini telah berjalan selama sembilan tahun. Peran pemerintah adalah membantu sekolah/madrasah menyediakan pengembangan kualitas guru, sarana dan prasarana, dan sistem pengujian.

"Sentralisasi pendidikan merupakan paradigma lama dalam pendidikan. Sedangkan desentralisasi merupakan implementasi dari *contextual learning*", ungkap mantan Rektor IPB tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Edy Tri Baskoro mempresentasikan tentang standar nasional pendidikan (SNP). Ada delapan standar yang dikembangkan BSNP, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar biaya, dan standar penilaian. "BSNP memiliki wewenang dan bertanggung jawab

M Aman Wirakarta-kusumah Ketua BSNP menerima cenderamata dari perwakilan mahasiswa Michigan State University sebagai bukti kunjungan mereka ke BSNP. Sementara BSNP juga memberikan standar nasional pendidikan kepada mereka.

* Bambang Suryadi

dalam pengembangan SNP. Selain itu BSNP juga menyelenggarakan ujian nasional dan menilai kelayakan buku teks pelajaran”, ungkap Edy Tri Baskoro sambil menambahkan standar tersebut bersifat mengikat untuk seluruh satuan pendidikan.

Kurikulum

Salah satu aspek dalam SNP yang ditanyakan para mahasiswa dari Michigan adalah masalah kurikulum. Menurut M. Aman Wirakartakusuma, kurikulum yang dikembangkan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Struktur kurikulum mencakup materi yang sifatnya nasional dan muatan lokal. Sebagai contoh dalam pendidikan bahasa, ada daerah yang menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran untuk muatan lokal. “Keragaman budaya ini merupakan kekayaan pendidikan Indonesia”, ungkap Aman seraya menambahkan ada pembatasan untuk muatan lokal dan untuk madrasah, ada materi tambahan, seperti materi agama.

R. Eko Indrajit Sekretaris BSNP menjelaskan bahwa keragaman budaya menjadi perhatian utama dalam pengembangan kurikulum. Keragaman diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketika ditanya tentang kurikulum tematik integratif, Laura Apol dosen Michigan State University tersebut berpandangan bahwa kurikulum tematik integratif merupakan pendekatan yang baru dan kreatif dalam pengembangan kurikulum. Selama ini mata pelajaran diajarkan secara sendiri-sendiri (terpisah), tetapi dengan cara ini ada interaksi antar mata pelajaran. Ini merupakan pendekatan yang sangat menarik. Kunci utama ada pada guru. *Integrating* juga

diartikan *infusing* dan *engagement*. Dalam hal ini keterlibatan siswa dalam pelajaran yang diajarkan menjadi sangat penting.

Ujian Nasional

Mengapa UN menjadi isu utama dan mengapa ada keingingan masyarakat untuk menghapuskan UN? Inilah satu pertanyaan kritis dari mahasiswa Michigan saat berdialog dengan BSNP.

Menurut Djemari Mardapi, Ketua Penyelenggara UNTingkat Pusat, Ujian nasional memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya ujian dilaksanakan masing-masing sekolah, kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah. Di masyarakat ada dua pandangan yang berbeda, yaitu pro dan kontra terhadap UN. Mereka yang menolak terhadap UN merasa bahwa yang paling mengetahui kondisi anak didik adalah guru. Sebaliknya mereka yang menerima UN berpandangan bahwa UN merupakan instrumen untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Pendidikan yang bermutu, salah satunya ditentukan oleh sistem penilaian yang baik. Karena itu melalui UN, pemerintah ingin meningkatkan mutu pendidikan”, ungkap Djemari Mardapi.

Terkait dengan kriteria kelulusan yang merupakan gabungan dari nilai sekolah dan nilai UN, Djemari menjelaskan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan DPR, untuk menentukan kelulusan digunakan formula gabungan antara nilai sekolah dan nilai UN.

“Bobot nilai sekolah adalah 40% dan bobot nilai UN adalah 60%. Kriteria kelulusan adalah 5.5 dengan catatan tidak ada nilai di bawah 4” ungkap Djemari sambil menambahkan bahwa tujuan penggabungan nilai tersebut adalah untuk memotivasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. ● *BangS*

Pengembangan SNPT: Regulasi Vs Otonomi

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamatkan kepada Pemerintah untuk mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). SNPT akan dijadikan acuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam mengembangkan instrumen akreditasi. SNPT juga akan dijadikan acuan dalam pembukaan perguruan tinggi dan program studi. Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta BSNP untuk mengembangkan SNPT yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Direk-

torat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kegiatan finalisasi SNPT dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama pada tanggal 7-9 Juni 2013 dan kedua pada tanggal 14-16 Juni 2013, di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan tim ahli dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Ketua BSNP M. Aman Wirakartakusuma dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, badan yang mengembangkan dan menyusun standar nasional pendidikan tinggi masih menimbulkan multitafsir. Namun



dengan adanya surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada BSNP yang meminta untuk menyusun standar tersebut, maka Badan yang dimaksud adalah BSNP.

Menurut Illah Sailah Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi (SPT) terdiri atas dua standar, yaitu (a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan (b) Standar Pendidikan Tinggi (SPT) yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. SNPT terdiri atas 8 standar ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. SPT terdiri atas standar akademik dan standar non akademik. Delapan standar tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar biaya, dan standar penilaian.

Proses pengembangan SNPT, tambah Illah Sailah, telah dilaksanakan oleh BSNP dan DIKTI dua tahun yang lalu. Namun belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri karena masih perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam beberapa aspek yang ada di dalam draf SNPT. "Salah satu diskursus yang muncul adalah apakah SNPT ini dibuat secara generik atau detail", ungkap Illah Sailah seraya

menambahkan perguruan tinggi sudah lama menunggu SNPT ini karena itu ditargetkan SNPT selesai pada bulan Juli.

Otonomi Perguruan Tinggi

Johannes Gunawan Guru Besar Hukum dari Universitas Parahiyangan mengatakan bahwa standar-standar yang dikembangkan tersebut merupakan pengejawantahan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. "Standar ini sifatnya minimal dan mengikat seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta", ungkapnya.

Pertanyaan yang muncul adalah, seberapa jauh Pemerintah memberikan otonomi kepada perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan? Menurut Johannes Gunawan, perguruan tinggi tetap memiliki otonomi, tetapi Pemerintah juga harus memikirkan mutu pendidikan dengan membuat peraturan yang mengikat. "Jumlah perguruan tinggi saat ini mencapai 3.124 lembaga yang terdiri atas perguruan tinggi negeri dan swasta. Jumlah yang banyak ini, jika diotonomikan atau tidak diatur maka akan terjadi hal-hal yang abai. Pemerintah tetap memberikan otonomi perguruan tinggi, tetapi Pemerintah tidak boleh kehilangan kendali mutu. Karena itu, sampai digit berapa Pemerintah harus mengatur perguruan tinggi?", ungkapnya. ● *BangS*

Anggota BSNP bersama tim ahli dan nara sumber mendiskusikan rancangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Diskusi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang SNPT.

PELAKSANAAN UNPK TAHAP II

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahap II dilaksanakan mulai dari tanggal 1-4 Juli 2013 untuk Program Paket C dan Program Paket C Kesetaraan. Sedangkan untuk Program Paket B dan Program Paket A dilaksanakan mulai dari tanggal 1-3 Juli 2013. UNPK Tahap II dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi. Peserta UNPK Tahap II adalah mereka yang tidak lulus UN Formal dan UNPK Tahap I serta mereka yang baru mendaftarkan diri dari satuan pendidikan nonformal. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan UNPK diperlukan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi mulai dari penyelenggara tingkat pusat sampai ke penyelenggara tingkat daerah dan satuan pendidikan kesetaraan.

Demikian kesimpulan dari acara rapat koordinasi penyelenggaraan UNPK Tahap II

II untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama ke perguruan tinggi bagi tamatan Program Paket C”, ungkap Khairil Anwar Notodiputro dalam sambutannya.

Untuk itu, bagi siswa yang tidak lulus UN Formal dan UNPK Tahap I diharapkan bisa memanfaatkan peluang ini. Berdasarkan data dari Puspendik, jumlah siswa yang tidak lulus UN Formal tahun ini sekitar 82.000 siswa. Namun tidak semua siswa yang tidak lulus UN Formal mengikuti UNPK Tahap II.

Sementara itu, M. Aman Wirakartakusumah mengatakan bahwa pelaksanaan UNPK Tahap II berbeda dengan pelaksanaan UNPK Tahap I, utamanya yang terkait dengan peranan perguruan tinggi dalam pengawasan ujian. “Pada tahap dua ini, pengawasan ujian tidak melibatkan perguruan tinggi. Artinya,



Para nara sumber rapat koordinasi persiapan pelaksanaan UNPK Tahap II (dari kiri ke kanan) M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP, Khairil Anwar Notodiputro Kepala Balitbang Kemdikbud, Djemari Mardapi Ketua Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat, dan Hari Setiadi Kepala Puspendik Kemdikbud.

di Jakarta pada hari Selasa (18/6/2013). Hadir dalam acara ini Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Ketua dan Bendahara Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi, serta para undangan lainnya.

UNPK Tahap II yang biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober, pada tahun ini dilaksanakan pada bulan Juli. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada peserta UNPK Tahap II untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kita ingin memberi kesempatan atau peluang kepada mereka yang lulus UNPK Tahap

pengawasan menjadi wewenang Dinas Pendidikan”, ucap Aman.

Kebijakan ini, tambah Aman, telah diputuskan dalam rapat pleno BSNP tanggal 4 Juni 2013. Dalam hal ini, BSNP telah mengirimkan surat edaran ke Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Rektor Perguruan Tinggi, dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Jadwal Ujian

Menurut Djemari Mardapi, UNPK Tahap II tetap dilaksanakan pada siang hari karena mayoritas peserta UNPK telah bekerja. “Mereka pada pagi hari masih bekerja di tempat kerja masing-masing. Karena itu ujian dilaksanakan pada siang hari”, ucapnya.

Untuk UNPK di luar negeri, tambah Djemari, tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan BSNP. Hal ini karena mereka hanya mendapat izin dari majikan pada hari Minggu. Karena itu UNPK di luar negeri memiliki jadwal tersendiri.

BSNP juga akan melakukan pemantauan pelaksanaan UNPK di daerah-daerah. Berda-

sarkan hasil pemantauan ini, akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UNPK.

Hasil pemindaian LJUN ditargetkan selesai pada tanggal 15 Juli 2013. Sedangkan hasil UNPK Tahap II akan diumumkan pada tanggal 27 Juli 2013. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan UNPK Tahap II. ●

Paket C

No.	Program	Hari	Tanggal	Waktu	Mata Ujian
1.	Paket C IPS	Senin	01 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	02 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Sosiologi Geografi
		Rabu	03 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Ekonomi Bahasa Inggris
		Kamis	04 Juli 2013	13.30 – 15.30	Matematika
2.	Paket C IPA	Senin	01 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	02 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Biologi Kimia
		Rabu	03 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Fisika Bahasa Inggris
		Kamis	04 Juli 2013	13.30 – 15.30	Matematika
3.	Paket C Kejuruan	Senin	01 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	02 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Matematika Bahasa Inggris

Paket B/Wustha

No	Hari	Tanggal	Waktu	Mata Ujian
1.	Senin	1 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
2.	Selasa	2 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Ilmu Pengetahuan Sosial Matematika
3.	Rabu	3 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Ilmu Pengetahuan Alam Bahasa Inggris

Paket A/Ula

No.	Hari	Tanggal	Waktu	Mata Ujian
1.	Senin	1 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
2.	Selasa	2 Juli 2013	13.30 – 15.30 16.00 – 18.00	Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu Pengetahuan Alam
3.	Rabu	3 Juli 2013	13.30 – 15.30	Matematika



Direktur Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI, Wartanto mempersentasikan perkembangan dunia kursus dan pelatihan di Indonesia di BSNP (9/4/2013). Dalam kesempatan tersebut Wartanto menyampaikan supaya BSNP memberikan perhatian kepada pendidikan nonformal dan informal sebagaimana pendidikan formal.

Pengurus Ikatan Geograf Indonesia (IGI) beraudiensi dengan anggota BSNP di Jakarta (9/4/2013). Suratman, Ketua IGI mengusulkan supaya mata pelajaran Geografi menjadi mata pelajaran wajib bersama sejarah Indonesia, sehingga nama mata pelajarannya adalah "Sejarah dan Geografi Indonesia". Sejarah untuk menimbulkan semangat jiwa kepahlawanan dan patriotisme. Geografi untuk meningkatkan wawasan nusantara.



Rapat Kerja antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Komisi X DPR-RI tentang penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2013. Komisi X DPR-RI merekomendasikan supaya dilakukan investigasi terhadap penyimpangan penyelenggaraan UN.

Dari kiri ke kanan, Djaali, Djemari Mardapi, keduanya anggota BSNP dan Fasli Jalal mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat menjadi nara sumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC). Acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi swasta ini membahas tentang ujian nasional. Diantara nara sumber lainnya adalah Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden dan Bambang Soedibyo mantan Menteri Pendidikan Nasional.



Laura Apol, Ph.D (kiri) dari Michigan State University bersama lima belas mahasiswa program doktor dalam berbagai bidang keahlian, berdialog dengan anggota BSNP (21/5/2013). Mereka melakukan kunjungan ke Indonesia untuk mengkaji sistem pendidikan nasional.

Rapat koordinasi pelaksanaan UNPK Tahap II di Jakarta (18/6/2013). UNPK Tahap II dilaksanakan pada tanggal 1-4 Juli 2013 secara serentak di seluruh provinsi.





Peserta rapat koordinasi persiapan pelaksanaan UNPK Tahap II tahun 2013 mendengarkan materi dari nara sumber.

Dari kiri ke kanan, Sheila, Heru Widiatmoko, Perwakilan dari American College Testing (ACT) dan M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP membicarakan masalah pengembangan soal ujian nasional di kantor BSNP (18/6/2013)



Gunawan Indrayanto (depan, kiri) menyerahkan rancangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) kepada M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP disaksikan ketua Tim Ahli SNPT. Senyum mereka merupakan ekspresi kesyukuran yang tak ternilai setelah menyelesaikan rancangan SNPT di Jakarta.

Kunjungi Website kami di:

<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605



9 770126 460552